



KEJUARAAN WUSHU LITUANIA KE-8

Seorang atlet berlaga di Kejuaraan Wushu (Kung Fu) Lituania ke-8 di Vilnius, Lituania, Sabtu (10/12). Kejuaraan Wushu (Kung Fu) Lituania ke-8 dimulai 10 Desember, menarik hampir 100 pesaing dari Lituania, Polandia, Estonia, India, dan negara lain yang ambil bagian.

Ratusan Demonstran Filipina Protes Anti-Pemerintah Marcos Jr

Tercatat sudah ada 17 kasus pembunuhan di luar proses hukum dan ketidakadilan lainnya di Filipina.

MANILA(IM)—Ratusan orang berbaris melakukan protes di ibu kota Filipina pada Sabtu (10/12). Mereka menyoroti meningkatnya jumlah pembunuhan di luar hukum dan ketidakadilan lainnya di bawah pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Para pengunjung rasa yang dipimpin oleh kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbasis di Filipina berkumpul di lapangan umum di Manila sebelum berbaris menuju istana presiden untuk menuntut keadilan bagi para korban. Polisi memperkirakan sekitar 800 pengunjung rasa ikut serta dalam aksi yang bertepatan dengan Hari HAM Internasional.

Cristina Palabay dari kelompok hak asasi Karapatan mengatakan, kampanye kontra-pemberontakan pemerintahan Marcos telah terdokumen-

mentasi setidaknya 17 kasus pembunuhan di luar proses hukum. Jumlah tersebut di samping empat insiden kekerasan lainnya dengan para korban masih terselamatkan.

Palabay, menyatakan, jumlah tahanan politik terus meningkat, dengan 828 ditahan pada 30 November. Setidaknya 25 dari mereka ditangkap setelah Marcos menjabat pada Juni. "Terlepas dari angka-angka kotor ini, tidak ada keadilan bagi para korban pembunuhan di luar hukum. Budaya impunitas terus memunculkan kepalanya yang buruk," ujarnya.

Penyelenggara aksi mengatakan, pengunjung rasa di Manila dan bagian lain negara itu termasuk keluarga aktivis yang hilang atau disiksa selama pemerintahan ayah Marcos, diktator terguling Ferdinand Marcos. Peserta demonstran

juga termasuk korban HAM di bawah mantan Presiden Rodrigo Duterte yang perang brutalnya terhadap narkoba sedang diselidiki oleh Pengadilan Kriminal Internasional setelah menyebabkan ribuan orang tewas.

Ayah Marcos digulingkan dalam pemberontakan "Kekuatan Rakyat" yang didukung tentara pada 1986 dan meninggal tiga tahun kemudian di pengasingan di Amerika Serikat tanpa mengakui kesalahan apa pun. Padahal dia, keluarganya, dan rekan lainnya mengumpulkan uang sekitar lima miliar hingga 10 miliar dolar AS saat berkuasa.

"Kami datang bersama sebagai keluarga korban dari berbagai rezim dan presiden. Kami telah memastikan bahwa setiap Hari HAM Internasional kami menyerukan keadilan, dan berkomitmen untuk tidak membiarkan pelanggaran yang sama terjadi pada orang lain," kata ketua kelompok korban HAM Evangeline Hernandez.

Pemerintahan saat ini juga dinilai telah meningkatkan penggunaan undang-undang

anti-teror untuk menekan perbedaan pendapat dan membatasi kebebasan berekspresi dan berserikat. Dewan HAM PBB telah mendesak pemerintahan Marcos untuk menanggapi pembunuhan dan pelanggaran hak lainnya.

Pemerintah mengatakan berkomitmen untuk melindungi HAM, mengutip reformasi dalam sistem peradilan negara. Menteri Kehakiman Filipina, Jesus Crispin Remulla, dalam pidatonya bulan lalu di Jeneva di depan Dewan HAM, menolok tuduhan bahwa ada budaya impunitas di Filipina. Dia mengatakan pemerintah tidak akan mentolerir pengingkaran keadilan atau pelanggaran hak.

Bertepatan dengan Hari HAM Internasional, jurnalis dan salah satu pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2021 Maria Ressa meluncurkan memoarnya di Manila berjudul "How to Stand Up to a Dictator: The Fight for Our Future". "Ini adalah saat ketika kami melihat hak-hak kami terkikis secara global, di mana Anda melihat geserannya dari demokrasi ke fasisme dan inilah sahnya bagi kami untuk bertahan,

jadi inilah yang kami lakukan hari ini," katanya.

Salah satu pendiri situs berita lokal Rappler ini menghadapi serangkaian tuntutan pidana yang diajukan oleh pemerintahan Duterte dan sekutunya terkait dengan liputan tentang pembunuhan dalam perang melawan narkoba dan dugaan jaringan disinformasi yang disponsori pemerintah. Bukunya memperingatkan tentang otoritarianisme yang merayap di Filipina dan bagian lain dunia yang diduga dibantu dan didukung oleh perusahaan media sosial yang algoritma dan model bisnisnya memungkinkan platform mereka menyebarkan kebohongan.

"Bukan suatu kebetulan ketika kebohongan menyebar lebih cepat dari fakta, Anda melihat erosi demokrasi secara global. Sampai kita menyelesaikan masalah ini untuk menghentikan korupsi dalam sistem ekosistem informasi kita, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah apa pun. Nyatanya, demokrasi sedang dalam bahaya," kata Ressa. ● tom

PBB Peringatkan Bahaya Barat Persenjatai Ukraina

NEW YORK (IM)—Dukungan militer Barat untuk Ukraina meningkatkan risiko senjata jatuh ke tangan yang salah. Peringatan itu diungkapkan Daniel Kovalik, profesor hak asasi manusia internasional di Fakultas Hukum Universitas Pittsburgh kepada Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada Sabtu (10/12). Menurut Kovalik, ketika senjata ini berhasil dikirim ke pasukan Ukraina, mereka sering digunakan untuk menembaki warga sipil di Donbass.

Berbicara pada pertemuan DK PBB untuk membahas pengiriman senjata Barat ke Ukraina, Kovalik mengklaim senjata ini berisiko dimiliki pengguna yang tidak diinginkan, termasuk penjahat. "Namun, bahkan ketika senjata diberikan kepada orang yang tepat, itu belum tentu berakhir di tempat yang tepat," ujar dia.

Dia mencatat Kiev telah mulai menembaki republik Donbass sejak tahun 2014. Profesor itu mengatakan dia baru saja menghabiskan seminggu di kota Donetsk dan menyaksikan serangan Ukraina terhadap sasaran sipil yang melibatkan penggunaan senjata Barat yang, tampaknya, telah dikirim "ke tangan yang tepat".

Pengacara itu ingat bahwa dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana pasukan Kiev telah menembaki sekolah lokal, stadion, dan fasilitas air. "Tentu saja, air di Donetsk sangat mahal," ujar dia, seraya menambahkan bahwa sistem penyaringan air kota telah dihancurkan pasukan Ukraina.

Dia juga merujuk pada materi sumber terbuka, termasuk laporan oleh outlet berita terkemuka Amerika, yang menguraikan kekhawatiran senjata Barat yang dikirim ke Ukraina dapat meningkatkan perdagangan senjata ilegal.

Secara khusus, Kovalik merujuk pada artikel CNN dari April 2022, yang mengklaim AS telah memutuskan mengambil "resiko sadar" dengan mempersenjatai Ukraina. Outlet tersebut mengutip para pejabat Amerika yang telah mengakui beberapa senjata yang dipasok Barat "mungkin berakhir di tangan militer lain" yang tidak direncanakan AS untuk dipersenjatai.

"Itu jatuh ke dalam lubang hitam besar, dan Anda hampir tidak merasakannya sama sekali setelah beberapa saat," ujar sumber CNN saat itu.

Kovalik juga mengutip kepala Interpol, Jürgen Stock, yang memperingatkan pada Juni bahwa

senjata yang dikirim ke Ukraina diharapkan "diperdagangkan tidak hanya ke negara tetangga tetapi juga ke benua lain."

Menurut Kovalik, masalah ini memerlukan pengawasan internasional. "Namun, AS tidak akan melakukan itu," papar dia.

Dia mencatat Kongres telah menolak resolusi beberapa hari yang lalu yang meminta bantuan AS ke Ukraina untuk diaudit.

"Siapa yang mengawasi para penjahat?" dia bertanya, menambahkan bahwa ini adalah tanggung jawab DK PBB. Pernyataannya datang saat Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, memperingatkan Barat tentang "konsekuensi" hukum pengiriman senjata ke Ukraina, yang kemudian digunakan untuk membunuh warga sipil di Donbass.

Dia juga merujuk pada materi sumber terbuka, termasuk laporan oleh outlet berita terkemuka Amerika, yang menguraikan kekhawatiran senjata Barat yang dikirim ke Ukraina dapat meningkatkan perdagangan senjata ilegal.

Secara khusus, Kovalik merujuk pada artikel CNN dari April 2022, yang mengklaim AS telah memutuskan mengambil "resiko sadar" dengan mempersenjatai Ukraina. Outlet tersebut mengutip para pejabat Amerika yang telah mengakui beberapa senjata yang dipasok Barat "mungkin berakhir di tangan militer lain" yang tidak direncanakan AS untuk dipersenjatai.

"Itu jatuh ke dalam lubang hitam besar, dan Anda hampir tidak merasakannya sama sekali setelah beberapa saat," ujar sumber CNN saat itu.

Kovalik juga mengutip kepala Interpol, Jürgen Stock, yang memperingatkan pada Juni bahwa

Australia akan Sanksi Rusia dan Iran Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia

SYDNEY (IM) - Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan Negeri Kanguru akan memberlakukan sanksi kepada Rusia dan Iran. Sanksi ini sebagai respon apa yang ia sebut pelanggaran hak asasi manusia "mengerikan."

Dalam pernyataannya Wong mengatakan Australia akan memberlakukan sanksi gaya Magnitsky pada 13 individu dan dua entitas termasuk polisi moralitas Iran dan Pasukan Perlawanan Basij dan enam orang terlibat dalam kekerasan terhadap pengunjung Rusia. Iran dilanda demonstrasi yang memicu kematian Mahsa Amini di tahanan pada September lalu.

Dalam opininya di Sydney Morning Herald, Wong mengatakan sanksi diberlakukan pada Seyed Sadegh Hosseini, orang yang ia gambarkan sebagai komandan senior Garda Revolusi Iran. Ia disanksi karena perannya dalam "menggunakan kekerasan tanpa pandang bulu terhadap pengunjung

rasa." "Pengebalaan hak asasi manusia rezim Iran pada rakyatnya sendiri mengentungkan masyarakat Australia, dan pelaku harus diminta pertanggung jawaban," tulis Wong dalam surat kabar Sydney Morning Herald, Sabtu (10/12).

Australia juga memberikan sanksi pada tujuh orang yang menurut Wong terlibat dalam percobaan pembunuhan mantan pemimpin pemerintah Rusia Alexei Navalny. Sanksi ini diumumkan dalam pernyataan Wong yang dirilis Asisten Menteri Luar Negeri Australia Tim Watts.

Selain memberikan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia, Wong mengatakan Australia juga memberikan sanksi keuangan pada tiga warga Iran dan satu pengusaha Iran yang memasok drone ke Rusia yang digunakan dalam perang di Ukraina.

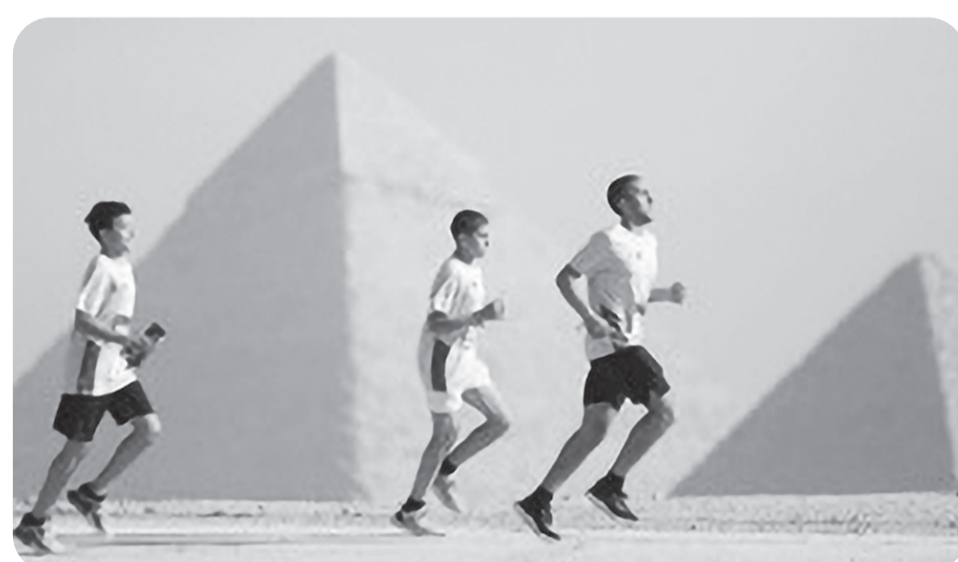
"Pasokan drone ke Rusia bukti peran Iran merusak stabilitas keamanan global, dan

sanksi ini memperlihatkan siapa pun yang memberikan dukungan materi pada Rusia akan menerima konsekuensinya," katanya.

Bulan Oktober lalu pemerintah Australia memberlakukan sanksi keuangan bersasaran dan larangan terbang pada 28 orang separatis pro-Rusia, menteri dan pejabat tinggi Rusia. Hal ini dilakukan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menganeksasi empat wilayah Ukraina.

Sejak awal perang di Ukraina, Australia sudah memberikan sanksi pada ratusan individu dan entitas Rusia. Sanksi diberikan termasuk di sektor perbankan dan semua organisasi yang bertanggung jawab pada utang kedaulatan negara itu.

Negeri Kanguru juga memasok perangkat pertahanan dan bantuan kemanusiaan pada Ukraina sembari melarang ekspor alumina dan aluminium termasuk bauksit ke Rusia. ● ans



PYRAMIDS HALF MARATHON

Sejumlah pelari berpartisipasi dalam ajang Pyramids Half Marathon yang digelar di destinasi wisata Piramida Giza di Giza, Mesir, Sabtu (10/12). Berlatarkan tengara Piramida Agung Giza, sekitar 4.000 pelari dari puluhan negara berkompetisi dalam Pyramids Half Marathon edisi keempat di sebelah barat daya Kairo, Mesir.

67 Jurnalis Dunia Tewas Sepanjang Tahun Ini

KIEV (IM) - Perang antara Rusia-Ukraina, kekacauan di Haiti, serta meningkatnya kekerasan oleh kelompok kriminal di Meksiko telah berkontribusi pada peningkatan jumlah jurnalis yang tewas saat melakukan pekerjaan pada 2022.

Itu berdasarkan laporan baru dari International Federation of Journalists (IFJ), yang 67 jurnalis dan pekerja media telah terbunuh di seluruh dunia sepanjang tahun ini, naik dari 47 pada tahun 2021.

Lebih banyak pekerja media yang terbunuh saat meliput perang di Ukraina, yakni total 12 orang daripada di negara lain mana pun tahun ini. Kebanyakan dari mereka adalah wartawan Ukraina, namun beberapa wartawan asing juga tewas.

Banyak kasus kematian terjadi pada minggu-minggu pertama perang yang kacau. Laporan IFJ juga menyebutkan penembakan fatal jurnalis Al Jazeera Shireen Abu Akleh, yang dibunuh oleh pasukan Israel pada 11 Mei. Tepatnya, saat dia meliput serangan militer Israel di sebuah kamp pengungsi di Tepi Barat.

Pekan ini, jaringan Al Jazeera secara resmi meminta Pengadilan Kriminal Internasional menyelidiki dan menggadi mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan Abu Akleh. IFJ mencatat setidaknya 375 profesional media, yakni 10 orang lebih banyak dari tahun lalu, saat ini berada di dalam

penjara. Sebagian besar dari mereka yang dipenjara berada di Tiongkok, Myanmar, Turki, Iran dan Belarusia. Dengan meningkatnya jumlah pekerja media yang terbunuh, IFJ dan kelompok hak media lainnya telah meminta pemerintah untuk mengambil tindakan lebih nyata untuk melindungi jurnalis serta kebebasan media.

"Kegagalan untuk bertindak hanya akan memberatkan mereka yang berusaha untuk menekan arus bebas informasi dan merusak kemampuan orang untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin. Termasuk, memastikan mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh tidak menghalangi jalan keterbukaan," ungkap Sekretaris Jenderal IFJ Anthony Bellanger dalam sebuah pernyataan.

IFJ juga menyatakan bahwa aturan oleh teror organisasi kriminal di Meksiko, serta pelanggaran hukum dan ketertiban di Haiti, juga berkontribusi pada lonjakan kasus pembunuhan. Tahun ini disebut sebagai salah satu yang paling mematikan bagi jurnalis di Meksiko.

Negara itu dianggap paling berbahaya bagi wartawan di luar zona perang. IFJ berbasis di Brussel, yang mewakili 600.000 profesional media dari serikat pekerja dan asosiasi di lebih dari 140 negara, juga mencatat kematian lima jurnalis di tengah krisis politik di Pakistan. ● gul

Erdogan akan Akhiri Jabatannya Pada 2023

ANKARA (IM) - Presiden Turki Presiden Recep Tayyip Erdogan mengisyaratkan pada hari Sabtu bahwa dia akan mencalonkan diri untuk terakhir kalinya tahun depan, seraya mengatakan bahwa sudah waktunya bagi ia untuk menyerahkan tongkat estafet kepada generasi muda.

"Mudah-mudahan pada tahun 2023 kita akan memulai pembangunan abad Turki dengan kekuatan yang akan kita terima dari dukungan bangsa kita untuk terakhir kalinya atas nama kita. Bendera keramat ini akan kami serahkan kepada generasi muda kami," kata Erdogan dalam pidatonya di Samsun, sebuah kota di Turki utara, dilansir dari Saudi Gazette, Minggu (11/12).

Turki akan mengadakan pemilihan nasional pada 2023. Partai AKP Erdogan ingin tetap memegang kendali, yang telah berkuasa sejak tahun 2003. Namun, mereka telah mengalami pukulan telak dalam jajak pendapat karena gejolak ekonomi baru-baru ini, yang dianggap oleh para ahli sebagai penurunan akibat salah urus pemerintahan.

Inflasi yang memecahkan rekor dan lira yang runtuh dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi kekhawatiran bagi banyak orang Turki, yang telah melihat standar hidup mereka anjlok. Berbicara pada Sabtu, Erdogan mengatakan bahwa Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) miliknya telah menjadikan Turki sebagai pemain kunci di panggung dunia.

"Kami tidak hanya memecahkan masalah kuno selama 20 tahun," katanya.

"Kami telah membangun infrastruktur layanan yang bahkan membuat iri negara maju. Sekarang, mereka mengatakan Turki adalah negara yang sangat berbeda. Setiap krisis global konduksi untuk pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan negara kita," kata Erdogan.

"Tentu saja, seseorang yang telah menjalankan negara selama bertahun-tahun mungkin memiliki kekurangan dan kesalahan," tambahnya. ● ans

Penduduk Satu Kota di Belgia Kaya Mendadak Gara-gara Menang Lotere

BRUSSELS (IM) - Lebih dari 150 penduduk dari sebuah kota paling beruntung yang pernah ada di Belgia menjadi kaya mendadak setelah menang jackpot lotere sebesar 123 juta poundsterling atau sekitar Rp2,3 triliun. Sebanyak 165 penduduk Olmen, di provinsi Antwerpen, Belgia bersama-sama mengikuti undian lokal Euromillions dan mengaku sangat senang mengetahui mereka telah memenangkan undian jackpot lotere. Masing-masing dari mereka diketahui mendapat 745 ribu poundsterling atau sekitar Rp14,2 miliar.

Sebelumnya para penduduk desa itu telah membuat perjanjian bahwa jika menang maka hadiahnya akan dibagi rata. Mereka kemudian patungan dengan jumlah nominal yang sama dan membeli tiket lotere mereka dari agen koran yang sama, bernama De Pershoek, atau Pojok Pers dalam bahasa Inggris.

"Mereka semua bermain bersama di agen koran yang sama di Olmen, di mana mereka masing-masing menginvestasikan 15 euro (12,96 poundsterling atau Rp246 ribu)," kata juru bicara National Lottery Joke Vermeere kepada media lokal.

"Ini bukan pertama kalinya De Pershoek mengorganisir pot grup semacam ini, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka memenangkan begitu banyak," imbuhnya seperti dikutip dari Daily Star, Minggu (11/12).

Wim Van Broeckhoven, pemilik agen koran pemenang, mengatakan kepada radio Belgia bahwa banyak pelanggannya yang tidak percaya setelah ke-

menangan tersebut.

"Saya sering harus mengulanginya lima sampai enam kali," akunya kepada stasiun radio lokal. Sementara pihak EuroMillions mengatakan angka kemenangan untuk Selasa 6 Desember adalah 12, 20, 25, 26 dan 27, dengan Lucky Stars 8 dan 12.

"Ada lebih dari 27 juta entry yang dibeli untuk pengundian, tetapi hanya satu yang cocok dengan garis kemenangan penuh," sambung pernyataan itu.

Ini bukan pertama kalinya sebuah sindikat terbentuk, di mana penduduk berkelompok bersama untuk meningkatkan peluang memenangkan jackpot - tetapi itu tidak selalu sesuai rencana.

Satu sindikat lotere menang-gil pengacara setelah salah satu kelompok tuduh menyimpan jackpot 828 ribu poundsterling (Rp15,8 miliar) untuk dirinya sendiri. Menurut dokumen pengadilan, Trent Bowden, dari Australia Barat, membeli tiket untuk sepuluh temannya menggunakan nomor yang sama setiap minggu.

Tetapi ketika kelompoknya akhirnya menang dalam undian, dia berusaha untuk mengklaim hadiah tersebut sebagai individu dan bukan untuk kelompoknya, demikian dugaannya. Trent, yang menjalankan lapangan tembak merpati tanah liat, kini menghadapi tuntutan hukum bersama penyelenggara undian, Lotterywest.

Dia dikatakan telah meraup 1.215 poundsterling (Rp23 juta) pada 29 Oktober tahun ini, tetapi alih-alih mengembalikannya ke grup, ia malah "menginvestasikan kembali" untuk kemenangan di pengundian berikutnya. ● gul